UMBARA
Indonesian Journal of Anthropology
Volume 7 (2) Desember 2022 || eISSN 2528-1569 | pISSN 2528-2115 || http://jurnal.unpad.ac.id/umbara
DOI : 10.24198/umbara.v7i2.36816

Penciptaan Pembangunan Desa Wisata Melalui Kerja Aktor Perantara

Sendi Kenia Savitri

Pascasarjana Antropologi, FISIP, Universitas Indonesia
sendi.kenia@ui.ac.id

Abstract

This study departs from a theory of 'Brokers as Assembler' which locates brokers as the harmonizers of various orientations of actors in two different social realities, namely disadvantaged populations and power holders in one development practice. Drawing from the role of brokers in the 'creation' of tourism village development through social forestry permits, this study offers analysis of brokers beyond their role in carrying out the development; but also in the process of its creation. The development planning, until the development process becomes a productive path that can create benefits for every actor involved. This study was conducted using an ethnographic design and a political ecology approach. The findings of this study suggest that the work of intermediary actors can not only be seen as intermediaries for the vertical relationship between communities holding power and disadvantaged communities. However, brokers also construct horizontal relationships among groups of people in the same social reality to gain access to resources. Thus, studies on intermediary actors must be seen more broadly than their role in agency, transformation, and mediation in the actualization of development.

Keywords: brokers, development, tourism, Anthropology

Abstrak

Studi ini bertolak dari teori *Brokers as Assembler* tentang aktor perantara yang berperan sebagai penyelaras berbagai orientasi aktor dalam dua realitas sosial yang berbeda, yakni populasi yang kurang beruntung dengan pemegang kekuasaan dalam satu praktik pembangunan. Mengambil contoh kerja aktor perantara dalam 'penciptaan' pembangunan desa wisata melalui izin perhutanan sosial studi ini menawarkan analisis pada kerja aktor perantara yang tidak hanya bisa dilihat dalam peranannya menjalankan pembangunan, melainkan juga pada proses penciptaannya. Perencanaan hingga proses adalah satu jalinan produktif yang menciptakan manfaat untuk setiap aktor yang terlibat. Studi ini dilakukan dengan desain etnografi dan pendekatan ekologi politik. Studi ini menemukan bahwa kerja aktor perantara tidak hanya bisa dilihat sebagai perantara atas hubungan yang vertikal antara komunitas pemegang kekuasaan dan komunitas yang kurang beruntung. Namun, aktor perantara juga merakit hubungan horizontal di antara kelompok masyarakat pada realitas sosial yang sama untuk mendapatkan akses sumber daya. Studi ini menawarkan perspektif yang lebih luas dalam studi pada peran aktor perantara, yaitu melihat peran mereka lebih dari sekadar peran agensi, transformasi, dan mediasi pada aktualisasi pembangunan.

Kata kunci: aktor perantara, pembangunan, pariwisata, Antropologi

Submitted: 26 November 2021 || Reviewed: 24 December 2022 || Accepted: 30 December 2022

Pendahuluan

Studi ini lahir dari keterlibatan peneliti sebagai tamu undangan di sosialisasi Desa Wisata Harjo pada bulan Maret 2021. Perkumpulan ini juga dihadiri oleh pemerintah desa, Dinas Perhutani setempat dan pemangku kepentingan lainnya. Peneliti diundang hadir untuk berbagi pengalaman dan memberikan informasi mengenai Desa Wisata yang pernah menjadi bagian pekerjaan sebelumnya. Pada sosialisasi ini, peneliti melihat cara sebagian aktor yang bukan warga lokal, mampu mengumpulkan sebagian besar warga Desa Harjo untuk berkumpul di pendopo.

Melihat proses yang terjadi saat sosialisasi, peneliti tertarik untuk menelusuri cara pihak eksternal dapat menjadi penyelenggara kegiatan sosialisasi desa dan menentukan arah perkembangan desa yang diharapkan. Perumusan masalah ini menjadi dasar penelusuran studi lapangan yang dilakukan selama kurang lebih tiga kali di Desa Harjo.

Studi lapangan ini menghasilkan kesimpulan mengenai peran penting aktor perantara (Neubert, 1996; Peace, 1998), yang dalam hal ini dilakukan pada upaya penciptaan pembangunan desa wisata. Temuan lapangan ini mengingatkan peneliti pada artikel Koster dan Van Leynseele (2018) yang menyebut "*Brokers as Assembler*". Dijelaskan bahwa aktor perantara berperan sebagai penyelaras, perakit berbagai orientasi aktor pada aktualisasi pembangunan. Namun, Koster dan Van Leynseele hanya menjabarkan peran aktor perantara pada dua realitas sosial yang berbeda, yakni komunitas pemegang kekuasaan dan komunitas yang kurang beruntung sebagai penerima manfaat intervensi aktualisasi pembangunan.

Sementara itu, penelusuran lapangan pada proses penciptaan Desa Wisata Harjo menghadirkan realitas sosial baru pada kerja aktor perantara. Mereka tidak hanya bergerak pada ruang lingkup mediasi atas dua realitas sosial yang berbeda, melainkan juga pada satu realitas sosial yang sama, yakni di antara calon penerima manfaat yang ingin mendapatkan akses sumberdaya. Oleh karena itu, berbeda dengan studi Koster dan Van Leynseele yang menempatkan penyelarasan berbagai kepentingan aktor *(actor oriented approach)* pada hubungan yang vertikal, studi ini melihat lebih luas kerja aktor perantara pada penyelarasan hubungan yang horizontal.

Jika pada studi Koster dan Van Leynseele, kesenjangan atas dua realitas sosial yang berbeda menjadi pintu masuk aktor perantara, maka studi ini melihat ruang yang diundang oleh negara menjadi kesempatan yang digunakan oleh aktor perantara untuk melakukan kerja pemerantaraan. Selain itu, studi ini juga mendeskripsikan kerja aktor perantara pada proses penciptaan pembangunan melalui ruang imajinasi dan harapan dari berbagai aktor. Hal ini berbeda dengan banyak studi aktor perantara sebelumnya yang hanya melihat pemerantaraan pada proses aktual pembangunan saja (Bierschenk *et al*., 2002; Boari dan Riboldazzi, 2014; Landis *et al*., 2018; Long *et al*., 2013; Meyer, 2010; Neal *et al*., 2022; Neubert, 1996; Waardenburg *et al*., 2022), termasuk yang juga dilakukan oleh Koster dan Van Leynseele (2018).

Studi-studi aktor perantara sudah berkembang pesat melalui berbagai bidang dan metodologi, seperti bidang pemilu (Koster, 2012), manajemen (Gastelaars, 2020), keuangan (Palomera, 2014), akses terhadap hak tanah (James, 2011), bidang hak asasi manusia (Merry, 2006; Merry, 2013), bahkan lebih khusus bidang pembangunan (Mosse dan Lewis, 2006). Namun, pandangan penyelarasan berbagai kepentingan aktor melalui ruang imajinasi dalam realitas yang sama untuk menciptakan pembangunan masih luput dari studi aktor perantara.

Studi aktor perantara menjadi salah satu bagian penting dalam literatur antropologi yang mengulas peranan aktor perantara pada fungsi agensi. Peran ini menjadi mediasi dalam narasi aktualisasi pembangunan. Namun, studi kasus penciptaan Desa Wisata Harjo memberikan gambaran lebih luas mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh aktor perantara.

Submitted: 26 November 2021 || Reviewed: 24 December 2022 || Accepted: 30 December 2022

Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial menjadi kesempatan yang diambil untuk mendapatkan manfaat sumber daya dari kegagalan pemanfaatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Persis seperti apa yang disebut oleh De Vries (2007) bahwa pembangunan adalah mesin keinginan pada ruang imajinasi yang ingin diwujudkan untuk melengkapi kekurangan pembangunan sebelumnya. Membaca wacana dan praktik penciptaan pembangunan, peneliti terpengaruh oleh kacamata De Vries (2007) dalam kaitannya dengan *development as desire machine.* Dengan menggunakan pendekatan Lacanian/Deleuzian, Vries menempatkan upaya mengisi kekurangan tertentu dalam aktualisasi pembangunan menjadi bahan bakar baru beroperasinya mesin pembangunan yang lain. Hal ini dinilai dapat melanggengkan praktik pembangunan di dunia ketiga, sehingga masyarakat masih menerima praktik pembangunan meskipun banyak menuai kegagalan. Aktor perantara dan pembangunan itu sendiri adalah satu kesatuan praktik yang tidak bisa dipisahkan penglihatannya. Oleh sebab itu, peneliti mencoba menggabungkan pendekatan Vries pada penerima manfaat pembangunan, dengan menempatkannya pada praktik perantaraan dalam penciptaan pembangunan yang dilakukan oleh aktor perantara. Pendekatan ini menghasilkan proses pembangunan itu diciptakan, pilihan pembangunan yang dikehendaki, imajinasi atas pembangunan yang diciptakan, relasi aktor serta cara semua digerakkan dalam jejaring produktif yang dapat memberikan manfaat.

Studi ini bertujuan mendeskripsikan kerja aktor perantara yang lebih luas sebagai penyelaras berbagai kepentingan aktor pada realitas sosial yang sama dalam kasus Desa Wisata Harjo. Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan studi aktor perantara yang kembali masif dilakukan oleh ilmuwan sosial, khususnya antropologi (Geertz, 1960; James, 2011; Lindquist, 2015; Stovel *et al*., 2011). Selain itu, studi ini juga mendorong studi aktor perantara yang harus dilihat lebih luas. Tidak hanya dilihat pada proses aktual pembangunan saja, tetapi juga proses pembangunan itu dapat dihadirkan dan diciptakan.

Kajian Pustaka

Aktor Perantara (*Broker*)

Sjoberg dan Redfield (1956) mengartikan peran dan fungsi aktor perantara, atau "broker", sebagai hubungan antara bagian dan keseluruhan, antara tradisi kecil dan besar dalam masyarakat yang kompleks sebagai bentuk peralihan otoritas politik dan transformasi hubungan antara desa dan kota (Geertz, 1960; Wolf, 1956). Lebih jauh, Wolf secara detail menegaskan bahwa aktor perantara adalah kelompok orang yang melakukan peran mediasi antara kelompok berorientasi komunitas dengan kelompok yang berorientasi pada bangsa melalui lembaga nasional (Wolf, 1956). Penjelasan Wolf mengingatkan pada berbagai lembaga donor yang memberikan perhatian pada berbagai praktik pembangunan, khususnya yang terjadi di dunia ketiga. Mosse dan Lewis (2006) menambahkan, keterlibatan aktor perantara (*intermediary-actor)* menjembatani antara pelaksana inisiatif pembangunan dengan penerima manfaat pembangunan.

Lindquist (2015) mengatakan dalam studi antropologi klasik, aktor perantara menjadi tokoh penting pada masa dekolonisasi dan menguatnya transaksionalisme di tahun 1950-1960an. Studi ini pernah mengalami surut perhatian pada masa sekitar *post*-kolonialisme, ketika kekuasaan secara produktif ditempatkan untuk mendisiplinkan dan membentuk subjektivitas individu. Namun, runtuhnya Bretton Woods dan kebangkitan neoliberalisme semakin mendorong rekonseptualisasi hubungan antara negara dan pasar yang berpotensi besar mengembalikan aktor perantara (James, 2011). Kebangkitan ini mencuatkan kembali aktor perantara dalam bentuk yang lebih luas daripada perantara dan proses mediasi. Chalhi *et al*. (2018) menyebut terbukanya ruang yang dapat dinegosiasikan ini memungkinkan kerja aktor perantara dapat beroperasi dalam "ruang yang diundang" oleh negara. Dengan demikian, ruang lingkup kerja aktor perantara menjadi lebih luas dan kemungkinan munculnya aktor perantara menjadi lebih besar.

Namun, berbagai studi mengenai aktor perantara masih menunjukkan ruang lingkup kerja aktor perantara dalam pola hubungan yang vertikal. Pola hubungan ini mengimplikasikan adanya kekuasaan yang diasumsikan selalu melahirkan inisiatif pembangunan. Kemudian, perantara difungsikan sebagai penerjemah, dan mengerjakan ulang praktik pembangunan itu sendiri sampai dapat memenuhi berbagai kepentingan.

Di dalam studi aktor perantara, Koster dan Van Leynseele (2018) telah berkontribusi pada penggambaran kerja aktor perantara melalui *Assemblage Theory*. Koster dan Van Leynseele menyebut aktor perantara adalah figur sentral yang memadukan berbagai kesenjangan hubungan kekuasaan yang tidak setara dan kepentingan yang berbeda. Aktor perantara ditempatkan sebagai 'perakit' pada proses 'menempa keselarasan', 'menyatukan' berbagai aktor, institusi, ataupun berbagai sumber daya berbeda sehingga membentuk jaringan atau kesatuan sementara. Jaringan dalam hal ini menjadi bagian penting kerja pemerantaraan yang dilakukan oleh aktor perantara. Bruno Latour dalam *actor network theory* (ANT) menyebut jaringan aktor perantara tidak hanya pada relasi sosial antar aktor manusia, melainkan juga objek teknis yang menghubungkannya. Aktor perantara menyesuaikan aksi-aksi yang berjalan sampai tercapai relasi yang stabil dalam mengoptimalisasi objek teknis (Latour, 2013). Konsep ini kemudian bersirkulasi di antara para aktor untuk memelihara relasi di antara mereka. Konsep jaringan dalam praktik pemerantaraan juga dianggap hal yang lazim untuk menunjukkan kemampuan aktor perantara itu sendiri dalam menjalankan praktik pemerantaraan (Mosse dan Lewis, 2006).

Kelahiran *Brokers as Assembler* ini adalah bentuk kritik Koster dan Van Leynseele terhadap teori *assemblage* yang luput melihat agensi individu aktor sosial, terlebih pada dinamika lokal yang terjalin dengan pola global seperti neoliberalisme. James (2011) menyebut pada masa ini studi mengenai aktor perantara muncul dan peran serta fungsinya berkembang dari sekadar proses mediasi. Sejak awal Koster dan Van Leynseele memang menempatkan ketertarikan pandangannya terhadap peran aktor perantara sebagai mediator ketimbang peran-peran yang lain. Peran mediasi ini yang membawa aktor perantara dalam argumentasi Koster dan Van Leynseele sebagai perakit, atau agen penghubung dalam proses aktuliasasi pembangunan.

Namun, Koster dan Van Leynseele hanya melihat peranan aktor perantara sebagai mediator pada satu poros hubungan yang bersifat vertikal yakni antara pemegang kekuasaan dan komunitas yang dianggap kurang beruntung. Pandangan ini berimplikasi pada cara pandang kerja aktor perantara yang terjadi dan dapat dilakukan dalam pelaksanaan aktualisasi pembangunan saja. Padahal pada masa masifnya keterbukaan negara membangun partisipasi dan berbagai upaya pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, kerja aktor perantara tidak hanya dapat dilihat pada pola hubungan yang vertikal sebagai pelaksana pembangunan. Aktor perantara juga bekerja dalam hubungan horizontal yang pada akhirnya juga berkontribusi dalam menciptakan pembangunan.

Aktor Perantara dalam Pembangunan

Studi ini mengadopsi pendekatan De Vries (2007) melalui *development as desire machine* yang berusaha memahami proses suatu praktik pembangunan dapat terjadi. De Vries melalui pendekatan Lacanian/Deleuzian berusaha memahami pembangunan bukan pada aktualisasinya, melainkan sebagai karya imajinasi yang menumbuhkan dan menggerakkan keterlibatan masyarakat dalam praktik pembangunan meskipun banyak menuai kegagalan. Karya ini merupakan kritik terhadap studi pembangunan yang hanya berkutat pada aktualisasi praktik, dan efek intervensinya, serta jarang menyentuh karya imajinasi yang terlibat dalam pemikiran pembangunan. Bahkan ketika karya imajinasi itu tersentuh dalam studi pembangunan, studi ini hanya berpusat pada aspirasi atau harapan individu, bukan pada impian dan keinginan kolektif sebagai manifestasi dari ketidaksadaran kolektif se-

perti yang ingin ditunjukkan oleh Vries. Pada akhirnya menurut Vries, gagasan pembangunan bergantung pada produksi keinginan, yang tidak dapat pernah dapat dipenuhi.

Di dalam studi kasus penciptaan desa wisata melalui program Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), ditemukan gambaran proses jalinan aktor di tingkat masyarakat yang dirakit oleh aktor perantara. Mereka bukan hanya melaksanakan pembangunan, tetapi juga menghadirkan pembangunan di wilayahnya. Hal ini menjadi kritik terhadap Koster dan van Leynseele (2018) yang hanya melihat aktor perantara sebagai penyelaras secara vertikal antara dua realitas sosial yang berbeda. Cara aktor perantara merajut berbagai kepentingan juga menjadi penjelasan detail yang tidak dijelaskan oleh Koster dan Van Leynseele dalam menggambarkan cara kerja *Brokers as Assembler*.

Karya-karya penciptaan pembangunan dan inisiatif melalui aktor perantara ini hanya dapat kita lihat jika kita memahami proses pembangunan diartikan, diterjemahkan, dan diimajinasikan oleh setiap aktor yang terlibat. Oleh karena itu, studi pada aktor perantara tidak cukup hanya memahami apa yang sedang dijalankan pada proses aktualisasinya, melainkan juga pada praktik imajinasi, khususnya yang melibatkan aparat negara atau yang menyerupai negara.

Metode

Penelitian dilakukan dengan desain etnografi melalui pendekatan ekologi politik dan disajikan secara deskriptif. Observasi terhadap praktik penciptaan desa wisata dilakukan sejak Januari 2021. Namun studi lapangan baru dilakukan pada Februari hingga April 2021.

Selama kurun waktu itu, peneliti tinggal bersama masyarakat sekitar 3-4 hari setiap minggunya, atau juga hadir pada kegiatan kemasyarakatan seperti sosialisasi, pertemuan warga dan sebagainya. Wawancara mendalam dilakukan terhadap seluruh aktor perantara yang terlibat dalam penciptaan pembangunan desa wisata juga organisasi kemasyarakatan yang ada di desa (Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), pemerintah desa, tokoh pemuda, dan *sesepuh* desa).

Catatan lapangan hasil wawancara dan observasi partisipatif menjadi data yang dianalisis melalui pendekatan teori aktor perantara. Nama informan dan desa disamarkan untuk menjaga privasi dan kenyamanan masyarakat di wilayah desa itu sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Mengenal Desa Harjo dan Potensi Sumber Daya

Topografi Desa Harjo berada di wilayah perbukitan dengan struktur batuan kapur dan karst yang mengelilinginya. Beberapa batuan kapur dan karst ini membentuk gua-gua dan labirin. Kondisi ini membuat lokasi Desa Harjo berada di tengah lembah yang sedikit tertutup. Memasuki desa ini kita akan melewati hamparan ladang jagung, persawahan, pepohonan jati, kayu putih, dan aroma belerang yang pekat menandakan kita sudah sampai di desa ini. Aroma ini berasal dari genangan air mendidih di bekas tambang belerang dan mineral bumi lainnya yang pernah dilakukan masyarakat.

Banyak lokasi di desa ini yang memiliki cerita mitos. Beberapa lahan di wilayah ini dianggap sebagai lokasi yang terlarang dan berbahaya bagi makhluk hidup. Hal ini karena banyak hewan seperti ayam, burung, bebek yang melintas di area tersebut sering kali tidak bertahan hidup atau mati. Aroma belerang di wilayah ini lebih pekat dibandingkan ketika memasuki desa pertama kali. Bangkai ayam, burung dan beberapa hewan-hewan lainnya ditemukan ketika peneliti berkunjung ke lokasi ini. Bangkai-bangkai ini mengering dan tidak menimbulkan bau sebagaimana mestinya. Menyusuri batas wilayah desa, terlihat titik bekas penambangan kapur yang juga pernah menjadi lahan penambangan fosfat masyarakat. Selain itu, terdapat juga gua dan bekas aliran sungai lama yang sudah mengering.

Pada umumnya, kondisi penampakan awal se-

perti ini mengindikasikan adanya situs prasejarah yang dapat ditelusuri. Pada paruh waktu lain peneliti datang, penyelusuran tempat ini dilakukan oleh beberapa tim yang ditemani oleh warga setempat. Penelusuran ini menghasilkan temuan permukaan berupa pecahan alat serpih, *mollusca* dan fragmen tulang-tulang dan gigi hewan (Gambar 1). Selanjutnya temuan ini ditinjau lebih lanjut oleh badan arkeologi setempat.

Gambar 1. Temuan Peninggalan Prasejarah sebagai Bagian Potensi Desa

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain dikelilingi oleh batuan kapur dan karst, Desa Harjo memang berada di tengah-tengah lahan milik Perum Perhutani dengan luas lahan kurang lebih 900 ha. Pemukiman warga berbatasan langsung dengan kawasan hutan, baik hutan produksi, maupun hutan lindung. Ladang-ladang yang digunakan oleh masyarakat untuk berkebun juga merupakam lahan milik Perhutani yang disewakan kepada masyarakat seharga Rp800.000,00 per tahun. Namun, jumlah ini dapat menyesuaikan dengan kondisi hasil panen masyarakat. Pada tahun ini, kebun dan sawah warga banyak diserang hama tikus, sehingga produksi panen menurun, bahkan terancam gagal panen. Dari kondisi ini perhutani menurunkan besaran iuran menjadi berkisar Rp50.000,00/tahun/persil. Keringanan biaya ini diajukan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Lembaga ini menjembatani kepentingan masyarakat dan Perhutani dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan bagi masyarakat, termasuk pengajuan pembukaan lahan produksi. Bagi dinas kehutanan, LMDH sendiri memiliki dua fungsi, yakni: 1) Memastikan pemasukan bagi dinas kehutanan setempat; dan 2) Sebagai organisasi yang dapat turut menjaga kawasan hutan dari penebangan liar, perburuan satwa dan kerusakan hutan lainnya.

Babak Pertama Praktik Pembangunan Desa Harjo (2018-2019)

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) melalui program Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) mencoba memberikan manfaat lebih atas hadirnya hutan dan lahan negara di sekitar masyarakat desa hutan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat di daerah. Mekanisme pemanfaatan IPHPS dapat diberikan kepada kelompok tani dan masyarakat desa hutan setempat yang mengajukan permohonan pemanfaatan dengan menyertakan fungsi pemanfaatan lahan yang akan digunakan. Meski Surat Keputusan (SK) IPHPS diberikan kepada perseorangan petani dalam satu kelompok, tetapi pada mekanisme ini biasanya hadir keterlibatan aktor di luar kelompok maupun masyarakat desa hutan. Aktor ini bisa berasal dari berbagai pihak, perseorang, lembaga pemerintahan, swasta, juga, lembaga swadaya masyarakat.

Di dalam konteks Desa Harjo, intervensi pengajuan ini dilakukan oleh LSM setempat bernama ‘LSM A’ yang mendorong LMDH Harjo mengajukan permohonan IPHPS. Di dalam pengajuan dan negosiasi yang dilakukan oleh LSM A terhadap LMDH Harjo, IPHPS difungsikan untuk penanaman jagung dan pisang pada lahan hutan produktif yang selama ini dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Pengajuan ini tidak dipahami secara utuh terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak

yang terlibat, sehingga menimbulkan konflik pada pertengahan tahun 2019.

Selain atas ketidakseimbangan informasi hak dan kewajiban LMDH Harjo dengan LSM A, pemanfaatan IPHPS belakangan juga dirasa merugikan masyarakat setempat. Alih fungsi lahan hutan kayu menjadi hutan tanam industri berupa ladang jagung dan kebun pisang mengurangi tegakan pohon dan resapan air yang menyebabkan banjir.

Selama ini masyarakat menanam jagung pada lahan-lahan kebun, atau di antara tegakan pohon yang juga masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tanaman jagung menjadi hasil masyarakat yang dapat dijual, tetapi tidak menjadi tanaman industri masyarakat setempat. Oleh sebab itu, alih fungsi lahan hutan produktif terhadap hutan tanam industri ini menjadi permasalahan baru bagi masyarakat desa hutan setempat yang biasa mengelola berbagai hasil pertanian dan hutan. Upaya penolakan dan pembatalan IPHPS kemudian dilakukan oleh LMDH setempat. Pada tahap ini, hadir aktor masyarakat lain yang menjembatani proses penolakan dan pembatalan IPHPS masyarakat desa hutan Harjo.

Babak Kedua: Wacana dan Praktik Pembangunan Desa Wisata Harjo (Akhir 2020–Awal 2021)

Pertengahan tahun 2019 hingga awal tahun 2020 adalah masa pergulatan penolakan IPHPS yang terjadi pada masyarakat desa hutan Harjo. LMDH Harjo adalah masyarakat desa hutan yang terbatas akses informasi, komunikasi dan proses negosiasi. Ruang kekosongan ini yang kemudian menghadirkan aktor baru dalam proses negosiasi dan komunikasi penolakan IPHPS yang ingin diwujudkan oleh LMDH Harjo. Kehadiran aktor yang dapat membantu menerjemahkan ulang maksud penolakan adalah hal yang sangat berharga bagi mereka. Hal ini sejalan dengan peran aktor perantara sebagai penerjemah ulang yang memediasi berbagai orientasi dengan kelompok atau komunitas yang lain (Mosse dan Lewis, 2006).

Proses penolakan dilakukan mulai dari mengirimkan surat permohonan pembatalan IPHPS kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga pemasangan spanduk bertuliskan penolakan penanaman jagung dan pisang di tengah hutan Desa Harjo yang biasanya menjadi wilayah pantau foto satelit dan patroli hutan oleh polisi hutan setempat. Sampai pertengahan 2020, penolakan terhadap IPHPS ini berhasil dilakukan.

AR, adalah aktor perantara yang pada akhirnya memiliki nilai investasi sosial yang baik di masyarakat karena dianggap membantu memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat Desa Harjo. Investasi sosial yang baik ini kemudian menjadi pintu masuk dalam melakukan praktik pemerantaraan pembangunan yang lain. Aksi pemerantaan pembangunan yang lain sejalan dengan yang disebut oleh De Vries (2007) bahwa mesin keinginan pembangunan berputar dari kegagalan pembangunan sebelumnya. Artinya kegagalan menjadi mesin imajinasi baru untuk melahirkan keinginan pembangunan lain yang dianggap dapat memperbaiki kegagalan pembangunan sebelumnya.

Pada babak pertama pembangunan, desa ini diperantarai oleh lembaga swadaya masyarakat. Lalu pada pembabakan kedua ini, LMDH Harjo diperantarai oleh individu yang kemudian menjaring individu-individu lain menjadi jejaring produktif yang menciptakan aksi penggagasan desa wisata. Individu-individu ini terjalin atas dasar kebutuhan, kelengkapan fungsi kerja operasional, kontribusi pada rencana penciptaan, dan juga akses jejaring yang lain.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Jeremy Bois Sevein bahwa setiap individu memberikan titik jaringan yang berpotongan. Namun, tidak semua menunjukkan minat dan bakat yang sama dalam membangun hubungan. Di dalam masyarakat yang kompleks, orang dengan minat dan bakat dalam membangun hubungan menjadi semakin penting. Seperti metafora kipas tangan jepang dan cina dengan berbilah banyak dan setiap bilah mewakili bi-

dang aktivitas, tetapi semuanya menyatu pada satu titik, yaitu orang di pusat jaringan ini (Salzman, 1975).

Penciptaan pembangunan pada babak kedua ini dilakukan oleh individu-individu produktif yang menjalankan berbagai peran yang dibutuhkan. Berawal dari AR, satu aktor yang memiliki investasi sosial yang baik pada masyarakat Desa Harjo, serta imajinasi pembangunan ideal yang dapat menjawab kebutuhan, melahirkan jejaring aktor yang berupaya menciptakan pembangunan lain bagi Desa Harjo dalam bentuk desa wisata.

Kerja Aktor Perantara untuk Mendapatkan Manfaat Sumber Daya

Pertemuan antara kesempatan, negosiasi, akses, advokasi, investasi sosial, dan imajinasi masa depan atas masalah sosial yang terjadi saat ini menjadi ramuan cantik terciptanya pembangunan yang lain pada akhir tahun 2020 hingga tahun 2021. Hal ini menjawab berbagai kebutuhan dan kepentingan masing-masing aktor yang terlibat.

Selanjutnya disajikan ilustrasi tentang pilihan pembangunan yang dikehendaki, proses kesepakatan, hingga menjadi aspirasi komunal yang diperjuangkan. Pertanyaan lanjutannya adalah mengapa wilayah ini yang dipilih?

Kesempatan

Sejak tahun 1999, program perhutanan sosial atau yang saat ini disebut Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) mulai didengungkan. Namun, program nasional ini baru mulai dijalankan pada tahun 2007. Program ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan kawasan hutan agar bisa mengurangi ketimpangan ekonomi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan pembangunan tidak hanya berasal dari kota, melainkan membangun dari pinggiran sekitar kawasan hutan (Ardiansyah, n.d.). Sampai hari ini, program perhutanan sosial masih menjadi alternatif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan dan produktivitas hutan di kawasan mereka. Data infografis perhutanan sosial melalui laman KLHK mencatat berbagai bentuk pemanfaatan IPHPS yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk pemanfaatan itu antara lain sebagai pusat pembibitan benih, wisata alam, pemanfaatan hasil hutan produksi, dan sebagainya.

IPHPS adalah bagian dari ruang yang dibuka oleh negara dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Ruang ini memungkinkan masyarakat di sekitar kawasan hutan menyampaikan aspirasi atas pembangunan yang mereka kehendaki. Pada praktiknya, penyampaian aspirasi ini tumbuh melalui berbagai mediasi. Ruang partisipasi ini juga berimplikasi pada organisasi kemasyarakatan yang berperan penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Organisasi ini diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti lembaga masyarakat adat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), maupun organisasi lain yang dibentuk dalam naungan pemerintah desa. Melalui organisasi kemasyarakatan ini, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) dapat dinegosiasikan dan menjadi bagian dari ruang yang diundang oleh negara.

Kesempatan juga bersifat pertemuan berbagai kepentingan yang dapat direalisasikan. Pembangunan desa wisata tentu bukan tanpa alasan dan seleksi dari berbagai kemungkinan yang ada, yang akan diurai pada faktor-faktor selanjutnya. Pembangunan model ini juga dikehendaki oleh kepala daerah terpilih. Hal ini bukan menjadi satu-satunya alasan mengapa pembangunan desa wisata dikehendaki dan diperjuangkan.

Peneliti menelisik kepentingan lain yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih. Desa ini berada di salah satu wilayah pemenangan suara saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah beberapa tahun lalu. Ketika proyek ini dijalankan, masa jabatan yang bersangkutan memasuki dua tahun terakhir. Proses ini menjadi bagian dari strategi mempertahankan dukungan pada kompetisi pemenangan selanjutnya. Strategi jangka panjang perlu

ditetapkan dengan pendayagunaan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan (Chandler, 1962; Myers dan Chandler, 1962; Williamson dan Chandler, 1964). Meski begitu, kemunculan kepala daerah ini tidak terang-terangan sebagai orang yang berada di depan *(front man)* kerja pemerantaraan ini. Dia menjadi sub-pendukung dalam mewujudkan kepentingan pemerantaraan yang memperkuat posisi aktor perantara. Proses pemenangan sebelumnya juga bukan begitu saja terjadi. Hubungan timbal balik ini juga memengaruhi alasan wilayah ini menjadi sasaran. Di dalam proses pemenangan sebelumnya, peran perantara yang mempertemukan komunitas negara dengan komunitas masyarakat juga sangat berperan. Perantara pemenangan ini dapat disebut sebagai tim sukses kampanye politik yang merupakan putra daerah wilayah pemenangan. Oleh sebab itu, selain karena kepemilikan akses, unsur primordialisme juga melingkupi jalannya proyek ini. Hubungan timbal balik pemerintah daerah terpilih dengan koordinator pemenangan berbuah posisi strategis sebagai asisten dan tenaga ahli kepala daerah terpilih. Di dalam pelaksanaan pemenangan sebelumnya, tentu koordinator ini tidak seorang diri, dia memiliki kaki-kaki yang bertugas sebagai pelaksana lapangan di berbagai daerah tujuan. Rajutan aktor dan kepentingan inilah yang terus terjalin seperti jaring laba-laba yang semakin lebar dengan perannya masing-masing, seperti yang disebut oleh Latour (2013) dalam *Actor Network Theory*.

Akses

Akses mempengaruhi kesempatan pada masyarakat dan proses pihak luar wilayah perhutanan Desa Harjo menjadi jalin produktif yang berperan besar menciptakan pembangunan desa wisata. Dengan kata lain, IPHPS tidak hanya memberikan manfaat pada masyarakat sekitar kawasan hutan seperti cita-citanya, melainkan mereka yang juga berada di luar kawasan hutan.

Seperti yang dikemukakan teori akses oleh Peluso dan Ribot (2020) dan Ribot dan Peluso (2003), akses ditempatkan lebih luas daripada kepemilikan aset sumber daya atau properti dalam menikmati manfaat sumber daya. Kemunculan teori ini bahkan mengurai proses munculnya konflik agraria di antara mereka yang memiliki hak properti *(property right)* dengan mereka yang memiliki kemampuan dalam mendapat manfaat dari sumber daya melalui seperangkat kekuasaan dan jaringan *(bundle of power and webs)*. Oleh karena itu, mereka yang dalam hal ini tidak memiliki seperangkat aset dimungkinkan mendapatkan manfaat melalui kemampuan, seperangkat kekuasaan dan jaringan. Akses adalah modal utama dalam pemerantaraan baik terhadap sumber daya yang dikontrol maupun jaringan lain yang dikembangkan secara produktif untuk memelihara sumber daya.

Akses dalam praktik penciptaan desa wisata ini adalah: 1) Kemampuan mendapat informasi serta hubungan dengan pemegang kebijakan seperti pemerintah daerah dan aparat negara di lingkungan perhutani; 2) Kemampuan mengembangkan jaringan tempat kerja-kerja pemerantaraan dilakukan; 3) Kemampuan mediasi masyarakat dan organisasi sosialnya; 4) Kemampuan mempengaruhi pengetahuan terhadap komunitas yang dikontrol.

Persoalan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam berupa kawasan hutan produksi dengan keanekaragaman hayati diperebutkan. Ditemukan potensi alam seperti komoditas minyak kayu putih, kayu jati, jagung, pospat, hingga temuan fragmen alat serpih masyarakat prasejarah pada kontur *curug* dan gua yang ada disekitar. Berbagai jenis burung, mamalia dan *herpetofauna* juga hidup di kawasan ini.

Di antara yang paling ditonjolkan adalah *Macaca fasicularis* dan *Trachypithecus auratus* dengan status rentan *(vulnerable)* berdasarkan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Kerentanan ini menjadi daya jual tersendiri dalam menggagas praktik konservasi yang dapat menghasilkan berbagai dukungan. Neoliberalisme membawa dampak pada keterhubungan antara penyelamatan

'non-human' yang dulu sebelumnya terpisah dengan pasar sebagai bentuk kapitalisme yang merusak lingkungan (Brockington, 2017). Tuntutan pertumbuhan ekonomi dan citra ramalan keberlangsungan planet bumi di masa depan mentransformasi hubungan konservasi dan kapitalisme yang semakin terjalin, hingga membawa implikasi pada hubungan sosial, manusia dan lingkungan (Igoe, 2010). Bahkan hari ini, kerja konservasi melalui lembaga filantropi juga dianggap sebagai bagian dari cara baru memproduksi uang dalam konteks penyelamatan lingkungan (Holmes, 2012). Ketika konservasi keanekaragaman hayati dan kapitalisme menjadi semakin terjalin, hubungan manusia-lingkungan menjadi semakin banyak melalui hamparan gambar, citra, dan media (Igoe, 2010). Hal ini menghasilkan konstruksi mengenai cara-cara menjalankan pembangunan.

Isu di Berbagai Media

Isu yang sedang berkembang melalui citra di berbagai media juga menjadi alasan pemilihan wilayah ini. Isu yang dimaksud seperti kerusakan alam, keberlangsungan hidup di masa depan, kesenjangan, kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan pembangunan. Selama beberapa dekade terakhir, rumusan isu-isu tersebut menjadi topik pembicaraan hangat pada ranah negara, bahkan masyarakat desa hingga pelosok pedesaan di berbagai dunia.

Pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai wujud nyata dalam merespon berbagai masalah sosial, ekonomi dan lingkungan dari kekacauan pembangunan sebelumnya. Agenda besar ini mendoktrin berbagai pihak untuk terlibat dalam realisasinya (Aas *et al*., 2005; Hamdan *et al*., 2021; Maynard *et al*., 2020; McComb *et al*., 2017; Nguyen *et al*., 2018; Özgit dan Zhandildina, 2021).

Menurut Fukuda-Parr (2016), kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dianggap mampu menjawab masalah yang lebih kompleks di abad 21 dan memenuhi kebutuhan transformasi ekonomi global daripada *Milleniumm Development Goals* (MDG's). Transformasi ekonomi ini diwujudkan melalui berbagai bentuk yang secara ideal mampu meningkatkan ekonomi, mengikis ketimpangan, peningkatan kesejahteraan, juga penjagaan lingkungan, sosial dan budaya. Oleh sebab itu, konservasi global dan kapitalisme global semakin terjalin erat dalam beberapa dekade terakhir (Scales, 2015).

Luisetti (2019) menegaskan, Bumi dan seisinya menjadi tokoh politik baru dalam narasi neoliberalisme dan kapitalisme akhir. Bentuk jalin erat konservasi, alam atau *non-human* dan kapitalisme sering kali diikat melalui kerja-kerja pariwisata yang mempertemukan aset dengan pasar. Pariwisata berkembang selaras dengan tema besar yang diusung melalui terminologi pariwisata berkelanjutan *(sustainable tourism)*. Terminologi ini dianggap menjadi cabang pembantu pembangunan berkelanjutan dalam menjawab tantangan marginalitas, menyelesaikan isu lingkungan, sosial dan ekonomi (Cole, 2006; Dangi dan Jamal, 2016; Paunović dan Jovanović, 2017).

Padahal pembangunan wisata dan konservasi juga tidak memungkiri masih dapat menimbulkan masalah seperti ekslusi dari masyarakat sekitar, petani tradisional, dan masyarakat adat (Long, 2001). Namun, Indonesia di masa kini sedang bergerak menuju yang telah disepakati dunia sebagai bentuk kontribusi dan respon pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Panuluh dan Fitri 2016). Sebagai kepala daerah terpilih, tentu isu-isu ini tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan pemerintahan dan perumusan kebijakan. Oleh karena itu, arah manajemen pemerintahan dan pertanggungjawaban juga diarahkan pada apa yang sedang dihadapi dunia hari ini (Hansson *et al*., 2019; Munro, 2020).

Serangkaian faktor ini merupakan perjalanan proses desa wisata dikehendaki sebagai bentuk pembangunan yang akan dilakukan melalui IPHPS. Namun, kehendak ini belum sampai pada melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Perjalanan penciptaan desa wisata dengan faktor-faktor tersebut masih dimulai sejak diterimanya kesempatan informasi program, ke tangan aktor perantara

yang menjadi asisten kepala daerah, mendapat dukungan kepala daerah, hingga turun kepada jaringan aktor perantara yang bergerak di lapangan. Jaringan aktor perantara yang bergerak di lapangan ini meliputi juga kelompok yang sebelumnya membantu penolakan IPHPS.

Namun, bagaimana itu disepakati oleh masyarakat setempat dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)? Bukankah mereka pernah menolak IPHPS sebelumnya, lantas hari ini mereka (LMDH) menyepakati.

Faktor terakhir adalah faktor yang mengunci faktor-faktor sebelumnya, yakni kesempatan sebagai sarana, kepentingan sebagai penggerak atau obyek teknis, akses dan isu sebagai pendukung jalan pemerantaraan dalam kerangka imajinasi pembangunan dan kesejahteraan. Kembali ke cerita penolakan yang terjadi pada 2018-2019, ketika ada keterlibatan aktor yang dianggap berjasa oleh komunitas karena memperjuangkan kepentingan mereka. Aktor ini bisa masuk ke dalam komunitas masyarakat karena dua hal, yakni wilayah Desa Harjo menjadi wilayah operasional kerja profesinya sebagai pendamping keluarga harapan dan yang kedua adalah keterhubungan jaringan dengan aktor lainnya yang memberikan akses informasi lebih daripada masyarakat setempat. Akses ini yang kemudian memberi ruang lebih pada proses mediasi dan negosiasi di antara berbagai ketegangan penolakan antara masyarakat, KPH, dan lembaga swadaya masyarakat pemegang izin IPHPS sebelumnya. Selain itu, keberhasilan penolakan yang pernah terjadi semakin memperkuat posisi aktor ini di tengah masyarakat khususnya LMDH. Bahkan, posisi aktor ini diibaratkan sebagai kerabat biologis oleh masyarakat setempat. Investasi sosial yang terjadi di akar rumput ini menjadi pintu masuk negoisasi sistem pemerantaraan melalui ketua LMDH.

Aktor perantara beroperasi pada imajinasi dari kegagalan pembangunan sebelumnya dan kesejahteraan di masa yang akan datang, melalui pendekatan personal, sosialisasi organisasi, perbincangan informal melalui warung kopi, dan pertemuan-pertemuan organisasi lainnya. Para pemuda yang pengangguran akan mendapatkan pekerjaan, petani akan mendapatkan nilai jual barang yang layak dari hasil panen, LMDH dan pemerintah desa akan memiliki pemasukan organisasi. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan akan meningkat, sehingga pembangunan menjadi sebuah harapan bagi masyarakat (Yarrow, 2011).

Kerja aktor perantara pada tahap ini bahkan mampu menciptakan kelompok organisasi baru berupa kelompok sadar wisata yang dicanangkan akan mendapat SK dari pemerintah desa. Jika pembangunan sebelumnya mengabaikan partisipasi dan keinginan masyarakat, maka aktor perantara saat ini beroperasi pada partisipasi dan kepentingan tertentu yang akan diakomodir melalui aksi pembangunan yang baru. Wacana dan praktik pembangunan ini adalah penciptaan lain dalam memenuhi kekurangan pembangunan sebelumnya.

Melalui kacamata De Vries dalam *the desire of development machine*, kekurangan aktualisasi pembangunan adalah 'pijakan' untuk keinginan pembangunan yang lain (de Vries, 2007):

> *In Lacanian terms it could be stated that the desire for development fills in a certain lack in its actualisation; it always points towards something else, for 'desire is always the desire of the "Other" (for our purposes the development machine). Desire then is the faculty to produce dreams and utopias that are both evoked and betrayed by actual development projects.*

Meski Vries menggunakan Lacanian untuk melihat keterlibatan masyarakat dunia ketiga dalam pembangunan di tengah berbagai kegagalan dan kesenjangan antara janji dan realisasi, pendekatan Vries tetap dapat memberikan pemahaman pembacaan mengenai wacana dan praktik pembangunan. Pendekatan ini menutupi kekurangan studi aktor

perantara yang luput terhadap ruang imajinasi dan virtual di antara peran dan fungsinya yang semakin berkembang pada masa *neoliberalism*.

Seperti yang dikatakan Latour (2013), kepentingan menjadi obyek teknis perakitan berbagai elemen aktor dalam jejaring produktif. Dengan kata lain, setiap aktor perantara tidak semata-mata memperjuangkan kepentingan masyarakat karena memiliki kepentingannya masing-masing. Seorang asisten kepala daerah terpilih, berimajinasi menjadi seorang calon legislatif pada beberapa tahun ke depan. Ini adalah langkah tindak lanjut peningkatan karir politiknya yang dibangun sejak masa organisasi, menjadi tim sukses, dan menciptakan sendiri penerimaannya di lapangan. Kepala daerah terpilih membayangkan memiliki jumlah suara pendukung yang dapat dipertahankan untuk kompetisi politik berikutnya.

Aktor perantara itu sendiri juga berlapis dan memiliki hirarki yang ditinjau dari seberapa besar kontribusi yang diberikan serta manfaat pada tujuan yang akan dicapai. Di antara tokoh kunci aktor perantara lainnya, masih ada aktor perantara lainnya yang menjadi pendukung teknis dengan kepentingan representasi diri.

Seorang tokoh pendukung aktor perantara dari kalangan pegiat wisata membayangkan akan membawa daerahnya memiliki daya jual wisata yang tinggi. Dia adalah agensi perjalanan yang terafiliasi dengan organisasi kepariwisataan lainnya di Jawa Timur. Jika pembangunan desa wisata ini berjalan dengan baik dan menciptakan satu destinasi baru yang menjual, maka akan berdampak juga pada kesejahteraan panggung sosial baginya.

Hal yang sama juga diinginkan oleh pendamping keluarga harapan yang menjadi pintu masuk ke masyarakat Desa Harjo. Dia membayangkan akan dapat secara utuh membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat terutama pemuda yang banyak menjadi pengangguran. Di kalangan masyarakat sendiri, peningkatan kesejahteraan yang adil dan partisipatif juga menjadi daya tawar yang membius sebagian besar warga.

Aktor perantara ini secara khusus mendatangi setiap aktor kunci di masyarakat seperti tokoh pemuda, perwakilan perempuan, kepala desa, dan terakhir mereka membawa semua misi kepentingan masyarakat itu kepada LMDH. Lembaga masyarakat desa hutan menjadi pintu keluar yang akan memberikan persetujuan dan pengajuan izin IPHPS kepada Perhutani setempat untuk dilanjutkan kepada KLHK.

Tidak hanya itu, mereka juga menyelenggarakan sosialisasi pariwisata untuk mengirim pengetahuan mereka mengenai pembangunan yang akan dijalankan. Sosialisasi juga menjadi forum dengar pendapat yang membuat setiap orang dan setiap organisasi di masyarakat merasa dilibatkan. Namun, partisipasi tidak diartikan sebagai seluruh kehendak dan kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kehendak pembangunan pariwisata itu merupakan intervensi dari luar yang diterjemahkan ulang untuk mendapat persetujuan dan kesepakatan. Berbagai cara dilakukan untuk membuat masyarakat menyepakati kehendak pembangunan tertentu yang akan diwujudkan melalui kuasa pengetahuan seperti yang dihayati oleh Foucault (Basumatary, 2020). Sejalan dengan yang disampaikan oleh Meyer (2010), bahwa aktor perantara tidak hanya menjadi agensi penyebaran pengetahuan, melainkan juga bergerak pada penciptaan pengetahuan baru yang dikehendaki.

Praktik penggabungan dapat menyatukan elemen yang berbeda dan menjalin hubungan di antara komunitas dalam praktik manajemen hutan (Li, 2007). Lebih lanjut, Li juga secara spesifik menggambarkan enam praktik perakitan komunitas yang dilakukan aktor perantara dalam penciptaan desa wisata: 1) menempa keberpihakan, 2) menjalankan teknis, 3) mengotorisasi pengetahuan, 4) mengelola kegagalan, 5) anti-politik, dan 6) menyusun kembali. Ini adalah perpaduan yang menyatukan berbagai agen seperti penduduk desa, buruh, pengusaha, pejabat, aktivis, pemerintah, ilmuwan dalam kerangka tujuan keuntungan, gaji mata pencaharian, kontrol, properti, efisiensi,

keberlanjutan, perlindungan dan juga politik. Pada akhirnya, kehendak yang diinginkan dalam bentuk desa wisata dapat disepakati oleh masyarakat setempat dengan hasil pengajuan permohonan izin pengelolaan IPHPS yang dilakukan oleh LMDH.

Simpulan

Aktor perantara bukan sekadar perantara yang menjembatani kekuasaan yang tidak setara. Mereka juga tidak terlihat sebagai individu dari institusi khusus baik itu NGO, pemerintah, maupun konsultan. Aktor perantara dapat muncul melalui pertemuan mengisi kekosongan, ruang aktualisasi diri, dan transaksi materi yang menjadi kesempatan melalui proses advokasi. Dapat disimpulkan, *broker* atau aktor perantara adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam merakit dan menggerakkan permainan seperti layaknya dalang dalam seni pertunjukan wayang atau pentas boneka tangan. Aktor perantara mengendalikan perwakilan/perwalian mereka yang bergerak sesuai arahan. Perwalian menurut ini dapat berupa pengungkapan niat mengembangkan kapasitas pihak lain yang tujuannya bukanlah menguasai, melainkan peningkatan kemampuan bertindak dan mengarahkan. Mereka tidak terlihat, tetapi dapat mengorkestrasikan praktik penciptaan pembangunan. Aktor perantara dapat bergerak melampaui ruang mereka berada, dalam mekanisme kerja yang hampir sama tetapi dengan teknik yang berbeda.

Relasi hubungan antar aktor perantara juga penting dalam kaitannya dengan relasi dengan masyarakat dan penciptaan imajinasi kehidupan yang lebih baik di masa depan yang mendorong keterlibatan masyarakat. Kehidupan lebih baik ini diartikan sebagai kemudahan dalam mendapat pekerjaan, mendapatkan upah, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih mudah. Tidak ada kondisi kekecewaan oleh pembangunan atau kekurangan dari ketidakhadiran pemerintah, kecuali fluktuasi hasil panen.

Dengan demikian, harapan tidak selalu berasal dari keputusasaan. Harapan dapat lahir dari permainan imajinasi atas tantangan yang ada di masa depan dan kesiapsiagaan yang harus dipersiapkan saat ini. Keterlibatan masyarakat memenuhi bayangan kehidupan yang lebih baik di masa depan, karena menganggap tantangan di masa depan juga semakin kompleks. Selain itu, kepemilikan hak atas sumber daya lokal bagi warga setempat juga menjadi faktor pemicu keterlibatan yang digunakan oleh actor perantara untuk menciptakan aktor perwakilannya dalam menjaring berbagai kesempatan yang lainnya.

Daftar Pustaka

Aas, C., Ladkin, A., dan Fletcher, J. (2005). Stakeholder collaboration and heritage management. *Annals of Tourism Research*, *32*(1), 28-48. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.04.005

Ardiansyah, T. (n.d.). *Perhutanan Sosial: Pengertian, Skema, PIAPS, dan Implementasi*. Dikutip dari https://foresteract.com/perhutanan-sosial/.

Basumatary, J. (2020). Michel Foucault on Regenerative Relatedness of Power/Knowledge and Truth. *Journal of Indian Council of Philosophical Research*, *37*(3), 323-341. https://doi.org/10.1007/s40961-020-00224-4

Bierschenk, T., Chauveau, J., dan de Sardan, J.-P. O. (2002). Local Development Brokers in Africa. The rise of a new social category. *Arbeitspapiere/Working Papers.* Institut Für Ethnologie Und Afrikastudien/Department of Anthropology and African Studies. Johannes Gutenberg Univ. Mainz. Working Papers, 13.

Boari, C., dan Riboldazzi, F. (2014). How knowledge brokers emerge and evolve: The role of actors' behaviour. *Research Policy*, *43*(4), 683-695. https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.01.007

Brockington, D. (2017). Conservation and Capitalism. In *International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology*. New Jersey: John Wiley & Sons, Ltd.

Chalhi, S., Koster, M., dan Vermeulen, J. (2018). Assembling the Irreconcilable: Youth Workers, Development Policies and 'High Risk' Boys in the Netherlands. *Ethnos*,

83(5), 850-867. https://doi.org/10.1080/00141844.2017.1362452

Chandler, A. D. (1962). Structure and Strategy: Chapters in the history of the American Industrial Enterprise. Massachusetts: MIT Press.

Cole, S. (2006). Information and empowerment: The keys to achieving sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, *14*(6), 629-644. https://doi.org/10.2167/jost607.0

Dangi, T. B., dan Jamal, T. (2016). An Integrated Approach to "Sustainable Community-based Tourism." *Sustainability (Switzerland)*, *8*(5), 475. https://doi.org/10.3390/su8050475

De Vries, P. (2007). Don't Compromise Your Desire for Development! A Lacanian/Deleuzian Rethinking of the Anti-politics Machine. *Third World Quarterly*, *28*(1), 25-43. https://doi.org/10.1080/01436590601081765

Fukuda-Parr, S. (2016). From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: shifts in purpose, concept, and politics of global goal setting for development. *Gender and Development*, *24*(1), 43-52. https://doi.org/10.1080/13552074.2016.1145895

Gastelaars, M. (2020). The New Management: About 'Process' and 'Control.' In *The Public Services under Reconstruction*. Oxfordshire: Routledge.

Geertz, C. (1960). The Javanese Kijaji: The Changing Role of A Cultural Broker. *Comparative Studies in Society and History*, *2*(2), 228-249. https://doi.org/10.1017/S0010417500000670

Hamdan, H. A. M., Andersen, P. H., dan de Boer, L. (2021). Stakeholder Collaboration in Sustainable Neighborhood Projects—A Review and Research Agenda. *Sustainable Cities and Society*, *68*, 102776. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102776

Hansson, S., Arfvidsson, H., dan Simon, D. (2019). Governance for Sustainable Urban Development: The Double Function of SDG Indicators. *Area Development and Policy*, *4*(3), 217-235. https://doi.org/10.1080/23792949.2019.1585192

Holmes, G. (2012). Biodiversity for Billionaires: Capitalism, Conservation and the Role of Philanthropy in Saving/Selling Nature. *Development and Change*, *43*(1), 185-203. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2011.01749.x

Igoe, J. (2010). The Spectacle of Nature in the Global Economy of Appearances: Anthropological Engagements with the Spectacular Mediations of Transnational Conservation. *Critique of Anthropology*, *30*(4), 375-397. https://doi.org/10.1177/0308275X10372468

James, D. (2011). The Return of the Broker: Consensus, Hierarchy, and Choice in South African Land Reform. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, *17*(2), 318-388. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2011.01682.x

Koster, M. (2012). Mediating and Getting "Burnt" in the Gap: Politics and Brokerage in a Recife Slum, Brazil. *Critique of Anthropology*, *32*(4), 479-497. https://doi.org/10.1177/0308275X12456643

Koster, M., dan Van Leynseele, Y. (2018). Brokers as Assemblers: Studying Development Through the Lens of Brokerage. *Ethnos*, *83*(5), 803-813. https://doi.org/10.1080/00141844.2017.1362451

Landis, B., Kilduff, M., Menges, J. I., dan Kilduff, G. J. (2018). The Paradox of Agency: Feeling Powerful Reduces Brokerage Opportunity Recognition Yet Increases Willingness to Broker. *Journal of Applied Psychology*, *103*(8), 929-938. https://doi.org/10.1037/apl0000299

Latour, B. (2013). Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory (translated by Irina Polonskaya). *Journal of Economic Sociology*, *14*(2). https://doi.org/10.17323/1726-3247-2013-2-73-87

Li, T. M. (2007). Practices of Assemblage and Community Forest Management. *Economy and Society*, *36*(2), 263-293. https://doi.org/10.1080/03085140701254308

Lindquist, J. (2015). Brokers and Brokerage, Anthropology of. In *International Encyclopedia of the Social dan Behavioral Sciences: Second Edition,* 870-874. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.12178-6

Long, J. C., Cunningham, F. C., dan Braithwaite, J. (2013). Bridges, Brokers and Bound-

ary Spanners in Collaborative Networks: A Systematic Review. *BMC Health Services Research, 13*(1), 158. https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-158

Long, N. (2001). Development Sociology: Actor Perspectives. Oxfordshire: Routledge.

Luisetti, F. (2019). Geopower: On the States of Nature of Late Capitalism. *European Journal of Social Theory*, *22*(3), 342-363. https://doi.org/10.1177/1368431018803764

Maynard, L., Jacobson, S. K., dan Kamanga, J. (2020). Stakeholder Collaboration: Evaluating Community-based Conservancies in Kenya. *ORYX*, *54*(5), 723-730. https://doi.org/10.1017/S0030605318000789

McComb, E. J., Boyd, S., dan Boluk, K. (2017). Stakeholder Collaboration: A Means to the Success of Rural Tourism Destinations? A Critical Evaluation of the Existence of Stakeholder Collaboration within the Mournes, Northern Ireland. *Tourism and Hospitality Research*, *17*(3), 286-297. https://doi.org/10.1177/1467358415583738

Merry, S. E. (2006). Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle. *American Anthropologist*, *108*(1), 38-51. https://doi.org/10.1525/aa.2006.108.1.38

Merry, S. E. (2013). Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle. In R. Provost., C. Sheppard (Eds.), *Dialogues on Human Rights and Legal Pluralism* (pp. 207-228). Berlin: Springer.

Meyer, M. (2010). The Rise of the Knowledge Broker. *Science Communication*, *32*(1), 118–127. https://doi.org/10.1177/1075547009359797

Mosse, D., dan Lewis, D. (2006). Theoretical Approaches to Brokerage and Translation in Development. In D. Lewis., D. Mosse (Eds.), *Development Brokers and Translators: The Ethnography of Aid and Agencies* (pp. 1-26). Colorado: A Kumarian Press Book.

Munro, V. (2020). CSR for Purpose, Shared Value and Deep Transformation. Emerald Publishing.

Myers, K. H., dan Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. *The Mississippi Valley Historical Review*, *49*(3), 536-537. https://doi.org/10.2307/1902596

Neal, J. W., Neal, Z. P., dan Brutzman, B. (2022). Defining Brokers, Intermediaries, and Boundary Spanners: A Systematic Review. *Evidence and Policy*, *18*(1), 7-24. https://doi.org/10.1332/174426420X16083745764324

Neubert, D. (1996). The Role of Local Brokers in the Development System. Experiences with "Self-help Projects" in East Africa. *Bulletin de l'APAD*, *11*. https://doi.org/10.4000/apad.731

Nguyen, T. B. T., Chau, N. T., dan Vo, L. X. S. (2018). Applying Network Analysis in Assessing Stakeholders' Collaboration for Sustainable Tourism Development: A Case Study at Danang, Vietnam. *International Journal of Tourism Policy*, *8*(3), 244-270. https://doi.org/10.1504/IJTP.2018.094502

Özgit, H., dan Zhandildina, D. (2021). Investigating Stakeholder Awareness of the Sustainable Development Goals and Tourism Stakeholder Collaboration: The Case of North Cyprus. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, *13*(4), 498-509. https://doi.org/10.1108/WHATT-02-2021-0027

Palomera, J. (2014). Reciprocity, Commodification, and Poverty in the Era of Financialization. *Current Anthropology*, *55*(S9), S105-S115. https://doi.org/10.1086/676420

Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. International NGO Forum on Indonesian Development. http://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf

Paunović, I., dan Jovanović, V. (2017). Implementation of Sustainable Tourism in the German Alps: A Case Study. *Sustainability*, *9*(2), 226. https://doi.org/10.3390/su9020226

Peace, A. (1998). Anthropology in the Postmodern Landscape: The Importance of Cultural Brokers and Their Trade. *Australian Journal of Anthropology*, *9*(3), 274-284. https://doi.org/10.1111/j.1835-9310.1998.tb00197.x

Peluso, N. L., dan Ribot, J. (2020). Postscript: A Theory of Access Revisited. In *Society and Natural Resources, 33*(2), 300-306. https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1709929

Ribot, J. C., dan Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, *68*(2), 153-181. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x

Salzman, P. C. (1975). Jeremy Boissevain. Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, *417*(1), 285. https://doi.org/10.1177/000271627541700164

Scales, I. R. (2015). Paying for Nature: What Every Conservationist Should Know about Political Economy. *ORYX*, *49*(2), 226-231. https://doi.org/10.1017/S0030605314000015

Sjoberg, G., dan Redfield, R. (1956). Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization. *American Sociological Review*, *21*(5), 643-644. https://doi.org/10.2307/2089122

Stovel, K., Golub, B., dan Milgrom, E. M. (2011). Stabilizing Brokerage. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108*(Supplement 4), 21326-21332. https://doi.org/10.1073/pnas.1100920108

Waardenburg, L., Huysman, M., dan Sergeeva, A. v. (2022). In the Land of the Blind, the One-Eyed Man Is King: Knowledge Brokerage in the Age of Learning Algorithms. *Organization Science*, *33*(1), C2-C3. https://doi.org/10.1287/ORSC.2021.1544

Williamson, H. F., dan Chandler, A. D. (1964). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. *Technology and Culture*, *5*(1), 107. https://doi.org/10.2307/3101138

Wolf, E. R. (1956). Aspects of Group Relations in a Complex Society: Mexico. *American Anthropologist*, *58*(6), 1065-1078. https://doi.org/10.1525/aa.1956.58.6.02a00070

Yarrow, T. (2011a). Introduction: Hope in Development. In *Development beyond Politics* (pp. 1–15). London: Palgrave Macmillan.

Submitted: 26 November 2021 || Reviewed: 24 December 2022 || Accepted: 30 December 2022